

ANALISIS MANAJEMEN BISNIS SYARIAH TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DALAM MELINDUNGI UMKM AKIBAT MASA PANDEMI COVID-19

Vivih Sofianti¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Mohamad Kharis Mubarak³.

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ Email: vivihsofianti8@gmail.com, ² Email: trifqythan@inais.ac.id,

³ Email: kharis.mubarak@inais.ac.id.

Abstract

This research is in the background due to the Covid-19 pandemic which has spread throughout the world, including Indonesia. As a result of the Covid-19 outbreak, the Indonesian Government issued a policy of Lockdown (area quarantine) and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) Bogor Regency, one of the regions that followed the policies of the Government. Because of that the community should remain silent at home. The result is a decrease in the income of MSMEs. Data on SMEs affected by Covid-19 were 1,120 SMEs in Bogor Regency. Therefore, the Bogor Regency Government through the Bogor Regency Trade and Industry Service and the Bogor Regency Small and Medium Business Cooperative Office need to issue a program to protect MSMEs during the Covid-19 pandemic. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation with the Bogor Regency Trade and Industry Office and the Bogor Regency Small and Medium Enterprises Cooperative Office. The efforts of DISPERDAGIN and the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UKM) by way of direct surveys, and data on MSMEs affected by Covid-19. From this data, the Agency makes a program in accordance with the complaints of MSMEs. The program plan will be implemented in 2021 because the Bogor Regency Government program has been ratified before the pandemic begins, therefore technically the program will be implemented starting in 2021.

Keywords: *Bogor Regency Government Programs, MSMEs, Covid-19, Islamic Business Management Analysis*

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang akibat pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh Dunia, termasuk Indonesia. Akibat mewabahnya Covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Lockdown (karantina wilayah) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kabupaten Bogor salah satu dari sekian daerah yang mengikuti kebijakan dari Pemerintah. Sebab dari itu masyarakat agar tetap berdiam diri di rumah. Akibatnya berimbas kepada penurunan pendapatan para UMKM. Data UKM yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.120 UKM di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor perlu mengeluarkan program untuk melindungi UMKM pada masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Upaya DISPERDAGIN dan Dinas Koperasi dan UKM dengan cara survei langsung, dan mendata UMKM yang terdampak Covid-19. Dari data tersebut Dinas membuat program yang sesuai dengan keluhan para UMKM. Rencana program tersebut akan di laksanakan pada tahun

2021 karena, program Pemerintah Kabupaten Bogor telah terlebih dahulu disahkan sebelum pandemi di mulai, oleh karenanya secara teknis program, program tersebut akan di terapkan mulai tahun 2021.

Kata Kunci: Kata 1; kata 2; kata 3; kata 4; kata 5.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang, yang masih memiliki banyak permasalahan, dalam bidang ekonomi, politik, sosial, atau bidang yang lainnya. Salah satu permasalahan Indonesia yaitu kemiskinan dan pengangguran. Banyaknya pengangguran di Indonesia karena masih kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak memiliki penghasilan, ataupun berpendapatan minim dan tidak merata. Akibat dari tingginya pengangguran maka akan berakibat kepada tingginya kemiskinan.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan dan sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, dengan meningkatkan sektor di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan jumlah pelaku usaha UMKM tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Bogor berjumlah 19.064 UMKM, data ini menurut DISPERDAGIN.

Ditengah perkembangan UMKM yang sudah mulai banyak di Indonesia, pada tahun 2020 UMKM di Indonesia di uji dengan munculnya wabah Covid-19 ditengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri Covid-19 sudah menyebar di berbagai daerah dimasyarakat, karena seiring waktu kasus positif Covid-19 semakin meningkat pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social Distancing* (jarak sosial) atau di kenal juga dengan upaya *Lockdown* (karantina wilayah) di pertengahan bulan Maret, kebijakan itu dilakukan agar dapat mengurangi percepatan penyebaran kasus positif Covid-19. Pemerintah juga meliburkan aktivitas kegiatan

pembelajaran seperti sekolah, kampus diliburkan, beberapa kantor juga ikut diliburkan, dan seperti tempat perbelanjaan jam operasi di batasi. Belum lama ini pemerintah juga menerapkan kebijakan baru yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada pertengahan April, yang menerapkan dari daerah Jakarta hingga daerah lain yang menyusul mengikuti kebijakan tersebut.

Dengan demikian akibat kebijakan di atas yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM. Karena akibat dari itu para pelaku UMKM pendapatannya berkurang. Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Dari sisi permintaan, UMKM secara drastis mengalami penurunan dari para konsumen. Akibat dari virus tersebut para konsumen takut tertular penyakit sehingga para konsumen berdiam diri dirumah. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada pendapatan dan penurunan omset penjualan.

Bogor adalah salah satu daerah yang terdampak dari Covid-19, bahkan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor ada yang sudah memasuki zona merah virus Covid-19. Akibat dari itu Kabupaten Bogor melakukan kebijakan *Lockdown* (karantina wilayah), dan juga menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Akibat dari itu masyarakat di Kabupaten Bogor dihimbau untuk tetap dirumah dan melakukan aktivitas dirumah. Akibatnya berimbasnya kepada UMKM yang berada di Kabupaten Bogor, contohnya pelaku usaha yang berjualan di sekolah, akibat dari sekolah diliburkan para pelaku usaha tersebut pendapatannya menurun bahkan tidak dapat penghasilan. Sebab itu para pemilik bisnis UMKM pun harus memiliki peran dalam mengatasi kejadian tersebut agar bisa mengantisipasinya supaya usaha yang dilakukannya tetap produkti. Saat ini yang perlu dilakukan untuk UMKM tetap menjalankan usahanya dengan menggunakan protokol kesehatan, sedangkan pemerintah

harus memikirkan cara untuk mengatasi laju penyebaran Covid-19 dan melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi.

Dalam situasi ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah, terutama pemerintah di Kabupaten Bogor, agar nasib UMKM di Kabupaten Bogor bisa terlindungi. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 93% para UMKM yang berada di Kabupaten Bogor mengeluhkan usahanya akibat Covid-19 ini. Sebab itu pemerintah Kabupaten Bogor perlu membuat program untuk perlindungan dan pemulihan kembali kepada UMKM yang terkena dampak dari Covid-19. Karena itu pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengeluarkan program yang tepat, cepat dan akurat. Tetapi dikarenakan program Pemerintah Kabupaten Bogor telah terlebih dahulu disahkan sebelum pandemi di mulai, oleh karenanya secara teknis program, program tersebut akan di terapkan mulai tahun 2021.

I.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk menguji :

1. Menganalisa pola perencanaan program pemerintah kabupaten bogor dalam melindungi UMKM dari dampak Covid-19 dipandang dari sudut manajemen bisnis syariah.
2. Menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten bogor dalam melindungi UMKM dari dampak covid 19.
3. Menggambarkan upaya yang dilakukan UMKM untuk tetap bertahan ditengah pandemi Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data

yang ditemukan di lapangan. (Sugiono, 2010:12-13).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi akibat masa pandemi covid 19 terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melindungi UMKM di Kabupaten Bogor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku UMKM

Menurut Ibu Desy selaku Kepala Bidang Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bogor dan Bapak Samsu selaku Kepala bidang pengembangan, perkuatan, perlindungan usaha mikro, pada bidang pemberdayaan usaha mikro di Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor dampak Covid ini ternyata sangat berdampak bagi para UMKM, diantaranya adalah beberapa permasalahan akibat Covid 19:

1. Produk Usaha Para Pelaku UMKM tidak laku

Menurut DISPERDAGIN penyebab produk para UMKM tidak laku, dikarenakan produk IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor ini mayoritas ke kebutuhan tersier. Maksud dari kebutuhan tersier itu sendiri adalah kebutuhan yang diluar bahan pokok, seperti beras dan lain sebagainya, Seperti: keripik, minuman, kue, dan lain sebagainya. Begitupun dengan IKM, konveksi mereka pada umumnya membuat boneka, membuat baju gamis, dan lain sebagainya. Karena keadaannya sekarang sedang ada Covid-19 pendapatan mereka juga menurun, jadinya masyarakat lebih mementingkan membeli beras di warung, membeli ayam dan lainnya, dari pada harus membeli baju, membeli makanan ringan, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka.

2. Pemasaran produk

Permasalahan ini yang banyak terjadi di IKM maupun di UMKM. Kebanyakan para pelaku IKM atau UMKM itu mayoritas ibu-ibu. Kebanyakan mereka membuat produk itu dengan

konvensional yaitu dengan menggunakan tangan sendiri, para pelaku usaha itupun tidak mengenal teknologi, apa lagi mengenal marketing onlinepun masih minim. Walaupun produk mereka dikemas secara menarik atau rasanya nikmat, tapi tetap saja mereka tidak tahu caranya memasarkan produk mereka dengan online ataupun market place, produk mereka tidak akan laku.

3. Berjualan di Rumah

Walaupun produk mereka sudah produk Covid-19, seperti masker, Tapi para UMKM tidak bisa berusaha untuk memasarkan produk mereka tidak akan laku dan tidak akan ada yang membeli.

4. Sudah Mengenal Teknologi, Tetapi Masih Minim Pengetahuan

Walaupun mereka sudah mengenal marketing online, sudah bisa berjualan online. Nyatanya dilapangan mereka kalah saing dengan pelaku usaha yang lain. Dikarenakan mereka tidak tahu cara mengemas produk agar terlihat lebih menarik bagi konsumen, tidak tahu cara mengambil foto yang baik sehingga gambar yang di dapat kurang menarik. Sehingga produk mereka menjadi kurang menarik bagi para konsumen.

5. Kurangnya Modal

Sudah bisa memasarkan online, hasil foto menarik, tapi saat ada konsumen yang ingin membeli jumlah banyak, mereka tidak bisa memenuhi pesanan tersebut akibat dari kekurangan modal.

6. UKM Tidak Dapat Berjualan

Contoh UKM yang berada disekolah mereka tidak bisa berjualan karena sekolah diliburkan, Dampaknya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya, karena sekolah tutup.

7. Bahan Baku Susah di Dapatkan

Karena Covid-19 ini pasar-pasar besar ikut tutup sehingga para UKM ingin membeli barang untuk dijual lagi merasa kesulitan. Walaupun buka dan ada bahan baku para UKM dibatas untuk membelinya.

Dari semua permasalahan diatas ternyata masi saling berkaitan antara masalah satu dengan masalah yang lainnya, dan bisa disimpulkan akibat

permasalah diatas para IKM dan UMKM menjadi lemah. Walaupun demikian dari dampak tersebut tidak semua UMKM yang terdampak oleh Covid-19, tapi ada beberapa UMKM yang menguntungkan,

III.2 Data UKM yang Terdampak Covid-19

Tabel 1
Data UKM Terdampak Virus Covid-19

No	Kecamatan	Jumlah
1	Babakan Madang	5
2	Bojong Gede	30
3	Caringin	31
4	Cariu	6
5	Ciampea	32
6	Ciawi	18
7	Cibinong	43
8	Cibungbulang	51
9	Cigombong	44
10	Cigudeg	46
No	Kecamatan	Jumlah
11	Cijeruk	43
12	Cileungsi	18
13	Ciomas	34
14	Cisarua	24
15	Ciseeng	86
16	Citereup	38
17	Dramaga	15
18	Gunung Putri	70
19	Gunung Sindur	6
20	Jasinga	6
21	Jonggol	18
22	Kemang	32
23	Kelapa Nunggal	11
24	Leuwiliyang	23
25	Leuwisadeng	8
26	Megamendung	19
27	Nanggung	29
28	Pamijahan	113
29	Parung	4
30	Parung Panjang	4
31	Rancabungur	103
32	Rumpin	6
33	Sukajaya	3
34	Suka Makmur	17
35	Sukaraja	6
36	Tajurhalang	59
37	Taman Sari	4
38	Tanjung Sari	8
39	Tenjo	1
40	Tenjolaya	4
	TOTAL	1120

III.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Para UMKM

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas ini selalu memberikan kebijakan kepada para UKM, seperti:

- A. Membantu untuk memfasilitasi para UKM seperti membuat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dan NIB (Nomor Induk Berusaha)
Para UKM harus memiliki IUMK dan NIB sebagai legalitas usahanya, agar diakui sebagai UKM.
- B. Membantu mengeluarkan surat legalitas SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) atau SKU (Surat Keterangan Usaha)
Surat tersebut hampir sama hanya ada perbedaan. SKDU itu untuk alamatnya di kota lain dan usahanya di kota yang berbeda, harus meminta SKDU ke Kelurahan. Sedangkan SKU KTP dan tempat usahanya sama.
- C. Mengeluarkan dan membantu memfasilitasi P-IRT(Produk Industri Rumah Tangga), Sertifikat Halal, Merk, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) , PKP (Pengusaha Kena Pajak)
Dalam pembuatannya Dinas Koperasi dan UKM membantu para UKM misalnya, dalam pengurusan para UKM harus ke Jakarta untuk mengurus surat tersebut pihak dari dinas tersebut akan mengantarkan, dan masalah biaya UKM tidak mengeluarkan biaya, karena sudah di tanggung oleh dinas tersebut. Tapi UKM yang di Fasilitasi UKM yang sudah diseleksi, dan layak untuk mendapatkan surat-surat tersebut. Dan untuk mendapatkan surat tersebut ada latihan dulu dan mempersiapkan berkas-berkas yang lain.
- D. Melakukan pelatihan yang di adakan Dinas Koperasi dan UKM
Misalnya seperti mengadakan pelatihan tentang manajemen, manajemen umum maupun tentang manajemen kewirausahaan.
- E. Klinik konsultasi bisnis
Klinik ini bertujuan untuk para pelaku UKM yang memiliki permasalahan sehingga bisa berkonsultasi ke klinik tersebut. Misalnya permasalahan tidak mempunyai modal, packaging tidak ada dan belum menarik, dan yang lainnya. Tatacaranya Dinas Koperasi

dan UKM merekrut setiap UKM di berbagai Kecamatan di Kabupaten Bogor yang mau ikut klinik konsultasi.
Cara untuk mengetahui permasalahan para UKM, yaitu:

1. Kumpulkan para pelaku UKM, melakukan sosialisasi, data UKM yang mempunyai masalah, selanjutnya mendiagnosa permasalahan, adanya pendampingan kelas dan pendampingan lapangan. Agar mengetahui ada UMK yang mempunyai hambatan atau tidak dan yang belum mempunyai izinnya. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM akan membantu untuk menyelesaikannya, misalnya masalah dalam modal, Dinas akan membantu dengan cara mengahdirkan Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Bogor dan CSR Perusahaan besar yang sanggup untuk memberikan pinjaman modal. Dan para UKM yang tidak memiliki surat jaminan akan di bantu oleh Dinas.

III.4 Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19

Dari permasalahan di atas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor sudah menemukan beberapa rencana program untuk memulihkan IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Adapun program DISPERDAGIN sebagai berikut:

- A. Membuat Video Tutorial
Tutorial ini sudah mengarah ke arah marketing online, video online. Tutorial tersebut berisi tentang: cara mengemas produk yang baik dan cantik, tutorial cara memfoto untuk mengambil angle yang baik dan benar, tutorial pencahayaan saat mengambil foto, tutorial memasang label yang menarik (bisa menyesuaikan warna antara produk dengan label). Semua itu akan diajarkan oleh para tutor, program tersebut akan dibuat, tapi akan tetap menggunakan protokol kesehatan.

Dengan cara membuat video ditempatkan yang sudah di sediakan, dengan menghias tempat tersebut dengan menarik dan para tutorial membuat video tersebut. Setelah video tersebut selesai video tersebut akan disebar kepada para IKM atau para UMKM, dengan memberi tahu di grup, untuk membuka link tersebut, ataupun menonton youtube tersebut. Program ini sudah menjadi rencana yang akan dilakukan oleh Dinas ini.

B. Menyiapkan Sarana Sebagai Penunjang

Para pelaku IKM sudah melihat video tutorial, contohnya membuat masker, tapi tidak punya mesin jahit, atau alat-alat yang lain. Maka akan memberikan sarana penunjang, seperti membelikan sedikit bantuan mesin jahit atau lainnya. Program ini yang sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.

III.5 Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19

Tabel 2
RENCANA PROGRAMKEGIATAN UNTUK
UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19
TAHUN 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.	Rencana Pemberian Bantuan Dalam Bentuk Hibah Kepada Kepada Pelaku Usaha Yang Terdampak Covid-19
	Permodalan Untuk Produk UMKM
	Fasilitas Pemasaran Produk UMKM
	Pembuatan Katalog dan Panduan Standar Produk

Program ini di rencanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021, dikarenakan program Pemerintah Kabupaten Bogor telah terlebih dahulu disahkan sebelum pandemi di mulai, oleh karenanya secara teknis program, program tersebut akan di terapkan mulai tahun 2021. Maksud dari program ini yaitu, memberikan bantuan hibah kepada pelaku UMKM yang sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19 agar dapat

meningkatkan atau memulihkan kembali dan memperbaiki ekonomi. Tujuannya agar pelaku UMKM agar tidak mengalami kesulitan dalam usahanya di tengah pandemi Covid-19 serta untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil.

A. Tahapan dalam pemberian hibah ke pada para UMKM:

1. Perencanaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro telah melaksanakan penyusunan data untuk dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha (UMKM) di setiap Kecamatan.

2. Proses Pengajuan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah telah menetapkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan hibah atau bantuan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bogor
- 2) Mempunyai surat keterangan domisili usaha
- 3) Mempunyai izin IUMK dan NIB
- 4) Harus mempunyai legalitas berbadan hukum, yaitu berupa koperasi atau lembaga lainnya.

Permohonan dana hibah yang telah diajukan, akan diberikan berupa bahan baku, sesuai dengan produk yang dihasilkan.

3. Verifikasi

Data yang telah masuk ke Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah akan di verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan persyaratan yang ada untuk mendapatkan dana hibah yang berkeadilan.

4. Monitoring dan Evaluasi

1. Sebelum dana hibah diberikan kepada pelaku usaha (UMKM) akan dimonitoring terlebih dahulu minimal satu kali kunjungan dan sesudah mendapatkan bantuan 3 kali kunjungan dalam satu tahun.
2. Evaluasi, akan di evaluasi semua pelaku usaha yang telah mendapat bantuan hibah.

III.6 Upaya Yang Telah Di Lakukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bogor Kepada UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Akibat dari wabahnya virus Covid-19 anggaran semua Dinas Perdagangan dan Perindustrian dikurangi. Memberikan pelatihan, mengadakan bazar untuk para IKM dan UMKM pun Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak diperbolehkan, karena adanya larangan untuk berkumpul. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada masa pandemi dengan cara survei langsung dan mendata para IKM dan UMKM. Bukan hanya sekedar mendata, tetapi juga melakukan perencanaan apa yang dibutuhkan, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Agar data yang dihasilkan akan berbuah aksi yang sesuai harapan dan tepat sasaran. Karena Covid-19 ini tidak ada yang tahu kapan datangnya, kitapun tidak ada persiapan terlebih dahulu, sebab itu kita mendata.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah mengumpulkan data dan menseleksi para IKM yang sesuai dengan kapasitas mereka yang sesuai dan tepat sasaran dengan sasaran program yang telah dibuat. Agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan pada setiap program yang telah di rencanakan. DISPERDAGIN juga membuat judul besar untuk programnya yaitu "Pemilihan Produk dan Memasarkannya Mengikuti Fenomena Protokol Kesehatan dan Covid-19".

III.7 Upaya Yang Telah Di Lakukan Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Kepada UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Akibat dari wabahnya virus Covid-19 ini anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di kurangi. Sehingga program yang telah dibuat untuk Tahun 2020 terhambat akibat kekurangan anggaran. Dinas ini telah mengupayakan mengajukan bantuan, tetapi bantuan untuk para pelaku UMKM belum ada yang turun.

Upaya yang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pun mensurvei langsung dan mendata para pelaku usaha UMKM yang terdampak akibat Covid-19

ini, dan juga melanjutkan program yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yaitu membantu pembuatan legalitas seperti NIB dan IUMK ke pada para UMKM . Data para UMKM yang terdampak akan di berikan atas pemerintah Kementrian Keuangan sudah menghadap ke Presiden. Dinas Koperasi dan UKM pun berharap agar dana untuk UMKM akan secepatnya turun, agar para UMKM bisa melanjutkan usahanya di tengah pandemi ini.

III.8 Perilaku UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Berikut beberapa para pelaku UMKM di yang berada di Kecamatan Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor:

1. Pelaku UMKM sandal Bu Rika, di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan. Menurut fitri sebagai penjaga toko sandal tersebut, akibat dari pandemi Covid-19 ini, dampak yang paling dirasakan yaitu: berkurangnya pembeli yang membeli di toko itu, sebelum ada CoVid-19 sabtu dan minggu banyak yang datang ke toko sandal tersebut untuk membeli, akibat adanya Covid-19 menjadi menurun. Selain itu untuk membeli barang untuk ditoko itu mengalami kesulitan, karena pasar pusat seperti Tanah Abang tutup, walaupun ada seperti di Bogor tetapi dalam mendapatkan barangnya sedikit, karena dibatasi untuk membeli barang tersebut, sebab harus berbagi dengan pedagang lainnya, tetapi dari harga barang tersebut tidak mengalami kenaikan. Akibat dari dampak tadi pendapatanpun menurun. Penurunan pendapatan cukup drastis hampir 30% - 50%, sebelum adanya Covid-19 sabtu dan minggu bisa dapat sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tapi setelah ada Covid-19 pendapatan jadi Rp. 500.000 - Rp. 700.000, hari biasa biasa kalau sepi bisa Rp. 200.000 – Rp. 300.000, sekarang Rp. 100.000. Cara toko ini agar terus tetap jalan dan masih berjualan yaitu dengan mengambil

- keuntungan yang tidak banyak dan menurunkan harga barang atau diskon, dari harga biasa Rp 50.000 jadi Rp. 35.000 – Rp. 40.000 supaya laku, dan barang-barang lama ditoko itu di diskon banyak. Dan karena belum ada himbauan tutup dari kecamatan atau desa setempat, hanya ada himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan disinfektan dan hand sanitizer, sebelum para pembeli masuk toko, akan disemprotkan dulu, dan jangan lupa menggunakan masker.
2. Pelaku UMKM bengkel lampu untuk mobil, Bapak Didin di Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan. Menurut Pak Indra selaku pekerja di bengkel tersebut, akibat adanya Covid-19 dampak yang paling dirasakan susah mendapatkan penghasilan, karena susah untuk dapat barang dari Jakarta, karena adanya lockdown merasa kesulitan untuk mengirim barang dari Jakarta kesini, dan juga sebaliknya. Akibat dari dampak tadi pun pendapatan menurun secara drastis, seperti bulan puasa kemarin turun sampai 80%. Cara bengkel lampu mobil ini agar tetap berjalan, tetap beroperasi seperti biasa, memasarkan lewat whatsapp agar menarik para konsumen.
 3. Pelaku UMKM penjual pisang Ibu Yeyet di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan. Menurut Ibu Yeyet selaku penjual dampak yang paling dirasakan pada saat Covid-19 penurunan pembeli, karena sekolah tutup langganan pembeli tetap di Ibu Yeyet tidak membeli pisang karena tidak bisa berjualan. Akibatnya pendapatan menurun hingga 30%, dan pisang yang dijual tidak cepat habis bisa sampai 2 minggu dari pengiriman pisang ke Toko Ibu Yeyet. Dalam pencarian bahan baku pun tidak sulit, dan harga dari pisang tersebut masih sama seperti biasanya. Cara Ibu Yeyet agar tetap
 - bertahan pada masa pandemi Corona-19 ini tetap berjualan, berapapun pendapatan yang di dapatkan bisa membeli pisang kembali dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 4. Pelaku UMKM pembuat kripik pisang, kripik singkong, kripik aceh Bapak Nday di Desa Situ Udik, Kecamatan Pamijahan. Menurut istri dari Bapak Nday dampak yang paling di rasakan saat adanya Covid-19 sulit untuk mencari bahan baku, karena warung tidak stok barang yang banyak, kesulitan pengiriman bahan baku karena dikirim dari daerah yang jauh. Menurut istri Pak Nday dampak ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi berpengaruh sedikit terhadap jumlah produksi dan pengiriman kripik tersebut dikurangi. Sebab kripik yang dibuat ini di taruh di toko-toko atau warung, karena jarang yang membeli kripik ini, sehingga pemilik toko atau warung mengurangi kripik yang di beri dari pembuat kripik tersebut. Akibatnya pendapatan menurun sampai 30% - 40%. Cara Pak Nday tetap bertahan untuk berjualan dengan cara menawarkan kripik buatannya ke toko-toko, warung, dan warga yang akan mengadakan acara di rumahnya. Menurut Pak Nday sendiri berapapun pendapatan bisa membeli barang baku, membayar upah kerja, dan kebutuhan sehari-hari.
 5. Pelaku UMKM Pabrik Roti di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang. Menurut anak dari pemilik pabrik roti tersebut dampak yang paling dirasakan, penurunan jumlah pembuatan roti tersebut, biasa satu bal yang berisi 25 kg terigu akibat adanya Covid-19 tidak sampai satu bal, karena roti tersebut di jualkan ke para pedagang keliling, karena pembeli menurun dan sekolahan tutup, tempat umum tutup akhirnya para penjual roti tersebut

mengurangi roti yang mereka jual. Akibatnya penurunan juga terhadap pendapatan sekitar 30%-40%. Cara pabrik roti tersebut agar tetap bertahan dengan cara, tetap melakukan produksi roti, dan berjualan roti tersebut.

Meskipun begitu para pelaku UMKM sudah berusaha menerapkan strateginya masing-masing agar tetap mendapatkan penghasilan selama wabah pandemi Covid-19 masih berlangsung, tanpa membahayakan kesehatan mereka, dan terpenting selalu menerapkan protokol kesehatan.

III.9 Analisis Manajemen Bisnis Syariah Berdasarkan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) Terhadap Program-Program Pemerintah Kabupaten Bogor

1. Perencanaan pada Program Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM

Perencanaan program kegiatan dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Program ini dibuat untuk tahun 2021 dalam jangka waktu satu tahun. Dalam menyusun perencanaan program tersebut, antara DISPERDAGIN dan Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa langsung membuat, tapi perlu adanya perencanaan, agar program tersebut tepat pada sasaran yang di tuju dan dapat terrealisasikan.

Dinas tersebut telah mempertimbangkan program yang direncanakan dengan melalui survei langsung ke para UMKM di Kabupaten Bogor, dengan keluhan mereka, dampak yang dirasakan, dan permasalahan apa yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19, setelah itu penyusunan data untuk dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha (UMKM) di setiap Kecamatan. Setelah semua data terkumpul dan dipelajari, setelah itu di jadikan bahan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat

dilihat sebagai bahan pertimbangan oleh dinas untuk membuat program tersebut. Adapun beberapa rencana yang sudah di tentukan antara lain: Membuat Video tutorial untuk UMKM agar meningkatkan pemasaran dan produk para UMKM tersebut, membuat sarana penunjang bagi para UMKM, pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala mikro menjadi kecil.

2. Pengorganisasian pada Program Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM

Dalam pengorganisasian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, terdapat struktur organisasi yang tergambar pada posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat program untuk UMKM hanya di sub bagian tertentu. Dalam DISPERDAGIN untuk membuat program tersebut ada di sub bagian industri, dan Dinas Koperasi dan UKM ada di sub bidang pengembangan, perkuatan, perlindungan usaha mikro, pada bidang pemberdayaan usaha mikro.

Pembagian tugas kepada setiap sub bagian di dinas yang melakukan pembuatan program tersebut, merupakan langkah untuk memastikan agar sesuai dengan apa yang ditugaskan, dan dikerjakan. Seperti dalam pembuatan program tersebut berarti ada penanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut, seperti program di DISPERDAGIN penanggung jawab di sub perindustrian, dan di Dinas Koperasi dan ukm di sub bidang pengembangan, perkuatan, perlindungan usaha mikro, pada bidang pemberdayaan usaha mikro. Dan dalam pelaksanaan, pesertanya dari UMKM di 40 Kecamatan Kabupaten Bogor.

3. Pelaksanaan pada Program Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor di sub bagian industri, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di sub bagian UKM, didasari dengan pengawasan dari dinas, serta kebutuhan UMKM yang terkait dengan program tersebut. Tetapi dalam program yang sudah direncanakan tersebut akan di laksanakan atau di realisasikan pada Tahun 2021, dikarenakan program Pemerintah Kabupaten Bogor telah terlebih dahulu disahkan sebelum pandemi di mulai, oleh karenanya secara teknis program, program tersebut akan di terapkan mulai tahun 2021.

Pelaksanaan program ini akan di lakukan juga oleh para UMKM di Kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor yang sudah terdata oleh dinas. Yang tidak semua program yang dibuat untuk semua UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, tapi ada beberapa program yang harus ada seleksi, syarat bagi UMKM , agar dapat memenuhi kriteria yang sesuai dengan program tersebut.

4. Pengendalian atau Pengawasan pada Program Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk Melindungi UMKM

Pengawasan terhadap program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, berupa evaluasi. Karena Program ini belum bisa terrealisasikan dan baru di realisasikan pada Tahun 2021. Tetapi walaupun belum terrealisasi DISPERDAGIN dan Dinas Koperasi dan UKM telah membuat tahapan dalam membuat rencana, dan selalu ada evaluasi di setiap rencana, karena untuk monitoring agar program tersebut sudah tepat pada sasaran

Pengendalian program tersebut akan berupa evaluasi. Dengan cara mengevaluasi kepada para UMKM yang sudah menerima bantuan, dengan pengecekan dan survei kembali, apakah dari program tersebut pelaku UMKM bisa berkembang, dan dapat diterapkan pada para pelaku usaha tersebut. Jika tidak maka dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dan biasanya hasil dari program tersebut akan dibuat laporan bentuk buku oleh masing-masing dinas tersebut.

IV. PENUTUP

IV.a. SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, telah membuat beberapa rencana program untuk para UMKM untuk pemulihan pasca Covid-19. Adapun program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten yaitu: Membuat video tutorial, membuat sarana penunjang bagi pelaku UMKM. Sedangkan program Dinas Koperasi Kecil dan Menengah yaitu: Rencana Pemberian Bantuan Dalam Bentuk Hibah Kepada Pelaku Usaha Yang Terdampak Covid-19 dengan bentuk berupa permodalan untuk para UMKM, fasilitas pemasaran produk UMKM, membuat katalog dan standar produk.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor yaitu dengan mensurvei langsung ke para UMKM, dan mendata para UMKM yang terdampak akibat Covid-19 dan permasalahan apa yang dihadapi, dan memberikan bantuan sosila berupa makanan pokok kepada masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah yaitu, mendata para UMKM yang terdampak, permasalahan apa yang dihadapi, membantu pembuatan surat izin legalitas seperti NIB dan IUMK untuk para UMKM. Sebab dari itu para UMKM perlu adanya upaya untuk bertahan pada masa pandemi ini, adapun upayanya yaitu: menurunkan harga barang atau diskon dan mendapatkan keuntungan sedikit supaya dagangannya laku, memasarkan lewat aplikasi

whatsapp, facebook atau media lainnya, dan tetap berjualan walaupun permintaan sedikit dan pendapatan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cv.Afabeta.

Khamidah, N. (2017). *Analisis Sistem Manajemen Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kc Banyumanik Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rais Agil Bahtiar, J. P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Vol. XII, Nomor 6*, 19-23.

Tanjung, J. P. (2018). *Analisis Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Medan)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara